



# 10 Fraksi DPRD

# Kubu Raya Setuju

■ Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024



SUARAPEMRED/MARGIUS

**SETUJUI RAPERDA** - Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.



**KUBU RAYA, SP** – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kubu Raya, Rabu (25/6).

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, menyampaikan bahwa meskipun Raperda telah disetujui, masih terdapat sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian legislatif, ter-

utama terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap berulang.

“Ada empat poin temuan BPK yang menjadi perhatian kami, khususnya soal aset daerah, seperti tanah dan kendaraan. Ini menjadi fokus utama kami saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan tersebut agar tidak terus menjadi catatan buruk dalam laporan keuangan daerah.

Selain itu, Jainal juga menyinggung adanya temuan, kecil terkait infrastruktur. Ia menyebutkan

bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti, termasuk pengembalian dana ke kas daerah.

“Nilainya kecil dan sudah dikembalikan, tapi tetap menjadi bahan evaluasi agar lebih hati-hati ke depan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, memastikan bahwa semua temuan akan ditindaklanjuti. Termasuk temuan kelebihan anggaran sebesar Rp13 juta yang disebutkan dalam audit.

“Itu akan segera dibahas bersama Bupati, Ketua DPRD, dan OPD. Harapannya, kelebihan tersebut tidak menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),

karena itu bisa menjadi persoalan,” jelasnya.

Menurutnya, potensi SILPA harus segera disikapi agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kita akan cari solusi bersama, dan saya pastikan jumlahnya tidak signifikan sehingga tidak akan menghambat jalannya pemerintahan,” tegas Sukiryanto.

Diketahui, dokumen persetujuan Raperda tersebut akan segera diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi, dengan batas waktu maksimal tiga hari setelah disetujui DPRD. **(mar)**